

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional (Ramadhani, 2022). Usaha tersebut merupakan tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan. Ditujukan tidak hanya untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku usaha, ataupun pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu, pengembangan UMKM mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural. Kontribusi tersebut adalah meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2016:1) UMKM merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan yang memenuhi kriteria serta definisi usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 yang berlaku di Indonesia. Kriteria UMKM dalam Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 yaitu: Usaha Mikro memiliki asset maksimal Rp 1.000.000.000 dan omzet maksimal Rp 2.000.000.000, Usaha Kecil memiliki asset lebih dari Rp 1.000.000.000- Rp 5.000.000.000 dan omzet lebih dari Rp 2.000.000.000 – Rp 15.000.000.000, Usaha Menengah memiliki asset lebih dari Rp 5.000.000.000 - Rp10.000.000.000 dan omzet lebih dari Rp 1.000.000.000 – Rp 50.000.000.000. Aktivitas UMKM tidak akan jauh terlepas dari kegiatan akuntansi yang sangat memiliki peran penting untuk menunjukkan perkembangan usaha atau kondisi keuangan sehingga keberlangsungan hidup usaha dapat terekam dan dapat dijadikan bahan untuk dapat di evaluasi.

Tabel 1.1
Kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

| No | Usaha | Kriteria | |
|----|----------------|----------------------|----------------------|
| | | Aset | Omzet |
| 1 | Usaha Mikro | Maksimal 1 Milyar | Maksimal 2 Milyar |
| 2 | Usaha Kecil | 1 Milyar - 5 Milyar | 2 Milyar – 15 Milyar |
| 3 | Usaha Menengah | 5 Milyar – 10 Milyar | 1 Milyar – 50 Milyar |

Provinsi Bali memiliki luas wilayah 5. 636.66 km atau 0,29% dari luas wilayah Indonesia, yang terdiri dari sembilan Kabupaten/Kota, diantaranya: Kabupaten Gianyar, Bangli, Tabanan, Karangasem, Klungkung, Jembrana, Badung, Denpasar dan Buleleng. Menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali Tahun 2023, jumlah UMKM di Provinsi Bali 429.382.UMKM yang tersebar secara tidak merata di seluruh Kabupaten dan Kota di pulau Bali, data tersebut disajikan dalam tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Data Keragaan UMKM Bali Tahun 2022

| No. | Kabupaten/Kota | Sektor | Klasifikasi | Transformasi |
|-----|----------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | Jumlah | Jumlah |
| 1. | Badung | Perdagangan | 10.068 | 21.699 |
| 2. | Bangli | Perdagangan | 23.196 | 44.251 |
| 3. | Buleleng | Perdagangan | 48.043 | 66.368 |
| 4. | Denpasar | Perdagangan | 10.616 | 29.749 |
| 5. | Gianyar | Perdagangan | 30.468 | 75.666 |
| 6. | Jembrana | Perdagangan | 44.973 | 57.183 |
| 7. | Karangasem | Perdagangan | 31.760 | 50.717 |
| 8. | Klungkung | Perdagangan | 23.610 | 35.792 |
| 9 | Tabanan | Perdagangan | 26.144 | 47.957 |

| | | | | |
|--|---------------|--|----------------|----------------|
| | Jumlah | | 248.875 | 429.382 |
|--|---------------|--|----------------|----------------|

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

Data keragaan UMKM, atau yang juga disebut sebagai data transformasi, mengacu pada statistik yang menggambarkan performa atau kondisi UMKM dalam suatu wilayah tertentu. Data ini mencakup berbagai aspek seperti jumlah UMKM yang aktif, jumlah tenaga kerja yang terserap, jumlah produksi, nilai penjualan, dan lain sebagainya. Data transformasi ini memberikan gambaran tentang seberapa besar kontribusi UMKM terhadap perekonomian suatu daerah.

Dalam konteks ini, data transformasi yang disajikan dalam tabel mengacu pada jumlah kualifikasi dari UMKM di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali. Data ini mencakup jumlah UMKM yang sudah memenuhi standar atau kriteria tertentu untuk dianggap sebagai UMKM yang berkualitas. Misalnya, UMKM yang memiliki tingkat produksi atau penjualan tertentu, atau UMKM yang sudah mengadopsi teknologi atau inovasi tertentu. Pentingnya data transformasi adalah untuk mengukur kemajuan dan pertumbuhan UMKM dalam hal kualitas dan kontribusi ekonominya. Data ini memberikan informasi yang lebih rinci tentang seberapa efektif UMKM dalam menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja, serta sejauh mana UMKM mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan teknologi.

Tabel 1.2 menyajikan data mengenai jumlah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam sektor perdagangan, serta jumlah transformasi yang terkait. Jumlah mengacu pada total jumlah UMKM yang terdaftar dalam sektor perdagangan di setiap kabupaten/kota. Jumlah ini mencakup semua UMKM yang terdaftar dan beroperasi dalam sektor perdagangan di daerah tersebut. Transformasi pada data yang disajikan menandakan peningkatan jumlah UMKM pada tahun terakhir. Badung: Kabupaten Badung memiliki total 10.068 UMKM dalam sektor perdagangan dengan jumlah transformasi sebanyak 21.699. Ini menunjukkan adanya aktivitas UMKM yang signifikan dalam sektor perdagangan di kabupaten ini. Kabupaten Bangli memiliki total 23.196

UMKM dalam sektor perdagangan dan jumlah transformasi sebanyak 44.251. Hal ini mencerminkan tingkat kegiatan ekonomi yang cukup tinggi dalam sektor UMKM perdagangan di kabupaten ini. Kabupaten Buleleng mencatatkan jumlah UMKM terbesar, yaitu 48.043, dalam sektor perdagangan. Jumlah transformasinya juga tinggi, yaitu 66.368. Ini menunjukkan bahwa UMKM di Buleleng memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam sektor perdagangan di Provinsi Bali. Ibukota Provinsi Bali, Denpasar, memiliki 10.616 UMKM dalam sektor perdagangan dengan jumlah transformasi sebanyak 29.749. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Denpasar adalah pusat administrasi, sektor UMKM perdagangan juga memiliki kehadiran yang kuat. Kabupaten Gianyar memiliki 30.468 UMKM dalam sektor perdagangan, dengan jumlah transformasi yang tinggi, yaitu 75.666. Gianyar juga menunjukkan tingkat kegiatan UMKM yang cukup tinggi dalam sektor perdagangan. Kabupaten Jembrana mencatatkan 44.973 UMKM dalam sektor perdagangan dengan jumlah transformasi sebanyak 57.183. Angka tersebut menunjukkan kontribusi yang kuat dari UMKM dalam sektor perdagangan di kabupaten ini. Kabupaten Karangasem memiliki 31.760 UMKM dalam sektor perdagangan dan jumlah transformasi sebanyak 50.717, menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang cukup signifikan dalam sektor UMKM perdagangan. Kabupaten Klungkung mencatatkan 23.610 UMKM dalam sektor perdagangan dengan jumlah transformasi sebanyak 35.792. Hal ini mengindikasikan kegiatan UMKM perdagangan yang cukup kuat di wilayah ini. Kabupaten Tabanan memiliki 26.144 UMKM dalam sektor perdagangan dengan jumlah transformasi sebanyak 47.957. Hal ini mencerminkan kontribusi UMKM yang signifikan dalam sektor perdagangan di kabupaten ini. Buleleng memiliki jumlah UMKM terbesar, sementara Gianyar memiliki jumlah transformasi terbesar dalam sektor ini. Transformasi UMKM menjadi penting untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif. UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian domestik, tercermin pada jumlah unit usaha yang banyak, penyerapan tenaga kerja yang tinggi, dan kontribusi yang besar terhadap PDB. Upaya melakukan transformasi UMKM ditempuh melalui pemanfaatan digitalisasi untuk meningkatkan daya tahan

yang lebih tinggi dan kapasitas yang lebih produktif dan inovatif (Bank Indonesia, 2020).

Dari banyaknya UMKM yang ada di Provinsi Bali, terdapat beberapa kendala yaitu kendala yang sering dihadapi UMKM dalam memperoleh pinjaman kredit untuk mencukupi kebutuhan dana usaha adalah sulitnya persyaratan yang diberikan oleh pemberi kredit yaitu lembaga perbankan, dimana salah satu syaratnya adalah laporan keuangan UMKM yang dapat mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Tetapi, pada kenyataannya banyak pelaku UMKM yang tidak menyusun atau membuat laporan keuangan dalam kegiatan usahanya (Widyawati, 2020).

Menurut Data Bank Indonesia Provinsi Bali yang dikutip melalui (<https://balipost.com>) menunjukkan jika UMKM memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional maupun Bali, sebagaimana tercermin pada besarnya jumlah UMKM, yaitu mencapai 99% dari jumlah usaha nasional maupun di Bali dan besarnya tenaga kerja yang bekerja pada usaha UMKM (97,05%). Dalam hal ini dapat dibuktikan melalui data yang diperoleh melalui (<https://balitbang.bulelengkab.go.id>) jika UMKM pada setiap Kabupaten mengalami peningkatan.

Perkembangan UMKM juga sangat dirasakan khususnya di Kabupaten Buleleng yang mengalami peningkatan sangat pesat, hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2022. Dalam hal ini banyak masyarakat yang mendirikan sebuah usaha baik dalam bidang UMKM, Perdagangan dan Industri. Semua jenis UMKM ini memiliki potensi yang tinggi dalam memberikan peluang untuk setiap orang yang akan menjalankan usaha. Jika usaha tersebut di kelola dengan berdasarkan SAK EMKM yang baik maka akan menjadikan usaha yang unggul. Perkembangan UMKM pada Kecamatan Buleleng kinerjanya sangat diperhatikan, sebab terjadi banyak aktivitas yang dilakukan salah satunya yaitu promosi dalam memperkenalkan UMKM melalui pameran dan festival budaya yang rutin dilakukan di Kecamatan Buleleng (Vijaya, dkk 2017). Perkembangan yang signifikan juga disertai dengan peningkatan pendapatan pada UMKM di kecamatan Buleleng. Berikut

merupakan rekap jumlah pendapatan UMKM di Kabupaten Buleleng per kecamatan,

Tabel 1.3
Rekap Pendapatan UMKM Tahun 2021 Per Kecamatan

| Kecamatan | Pendapatan UMKM |
|------------------|------------------------|
| Buleleng | 3,54 milyar |
| Gerokgak | 2,55 milyar |
| Busungbiu | 1,2 milyar |
| Sukasada | 1,14 milyar |
| Seririt | 1,3 milyar |
| Tejakula | 2,79 milyar |
| Banjar | 1,62 milyar |
| Sawan | 762 juta |
| Kubutambahan | 566 juta |

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng (2022)

Kecamatan Buleleng menempati posisi teratas pendapatan UMKM tahun 2022. Penelitian ini tertarik untuk menganalisa faktor-faktor pendorong yang mampu membuat pelaku UMKM di kecamatan Buleleng meningkatkan pendapatan usahanya untuk kemudian dapat menjadi bahan evaluasi bagi pelaku UMKM di kecamatan lain agar dapat melakukan dan mengupayakan peningkatan pendapatan UMKM. Keberhasilan UMKM dalam meningkatkan pendapatannya dapat mencerminkan peningkatan konsumsi masyarakat terhadap produk dan layanan lokal. Peningkatan ini dapat menggairahkan aktivitas ekonomi, mendorong permintaan, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan agregat daerah. UMKM yang sukses seringkali menjadi tulang punggung ekosistem bisnis lokal. Keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM dapat menciptakan sinergi di antara pelaku bisnis lokal lainnya, baik skala kecil maupun besar, yang turut berkontribusi pada pendapatan agregat (Seran, 2019).

Terdapat beberapa alasan kuat peneliti memilih Kecamatan Buleleng sebagai lokasi penelitian. Salah satu alasan utama adalah data yang terdapat dalam Tabel 1.3 menunjukkan bahwa Kecamatan Buleleng memiliki

pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tertinggi di antara kecamatan lainnya, yakni mencapai 3,54 miliar rupiah. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kecamatan Buleleng memiliki potensi ekonomi yang signifikan dan memiliki dinamika yang menarik dalam sektor UMKM. Selain itu, pendapatan UMKM yang tinggi juga bisa menjadi indikasi adanya aktivitas bisnis yang berkembang pesat di wilayah tersebut. Hal ini bisa mencerminkan potensi pasar yang besar, inovasi bisnis, akses ke sumber daya, atau faktor-faktor lain yang bisa menjadi fokus penelitian. Selain faktor ekonomi, Buleleng juga menawarkan beragam karakteristik sosial, budaya, geografis, atau kebijakan yang bisa menjadi faktor penting dalam penelitian yang dilakukan. Kombinasi dari faktor-faktor ini bisa membuat Buleleng menjadi lokasi penelitian yang menarik dan relevan untuk memahami lebih dalam tentang dinamika UMKM dan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi local (Keristina, 2023). Oleh karena itu, berdasarkan data pendapatan UMKM yang tinggi, Kecamatan Buleleng menjadi pilihan yang rasional dan berpotensi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Permodalan memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan modal yang cukup, UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi mereka, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan kualitas produk atau layanan yang mereka tawarkan. Selain itu, modal juga memungkinkan UMKM untuk melakukan riset dan pengembangan produk baru serta inovasi dalam layanan, yang dapat membantu mereka menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pendapatan secara keseluruhan. Selain itu, modal dapat dialokasikan untuk kegiatan pemasaran dan promosi yang lebih agresif, memungkinkan UMKM untuk menjangkau lebih banyak konsumen potensial dan meningkatkan kesadaran merek mereka. Dengan demikian, permodalan tidak hanya memberikan akses ke dana bagi UMKM, tetapi juga membuka pintu bagi berbagai peluang untuk meningkatkan pendapatan melalui pengembangan produk, ekspansi usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan pemasaran yang efektif (Gonibala & Maramis, 2019).

Dalam banyak kasus, UMKM memiliki keterbatasan akses terhadap permodalan yang memadai, sehingga fokus penelitian lebih condong pada bagaimana pengelolaan sumber daya yang tersedia, seperti anggaran kas yang efisien, modal kerja yang optimal, dan leverage keuangan yang tepat, dapat mempengaruhi pendapatan usaha. Penelitian memiliki keterbatasan ruang lingkup, di mana peneliti memilih untuk memusatkan perhatian pada variabel-variabel tertentu yang dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha, tanpa memasukkan permodalan sebagai variabel tambahan.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sejauh mana peningkatan pendapatan akan berkontribusi terhadap laba. Misalnya, biaya tambahan yang terkait dengan anggaran kas. Modal kerja, dan *financial leverage*. Dalam konteks keuangan perusahaan *theory cash budgeting* dapat menjelaskan bahwa, anggaran kas yang efisien berperan penting dalam memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk operasional sehari-hari, menjaga kelancaran kegiatan usaha, dan memberikan stabilitas finansial (Bandiyono & Mayangsari, 2021). Manajemen modal kerja yang baik, termasuk pengelolaan persediaan dan piutang, dapat mempengaruhi tingkat likuiditas perusahaan, memberikan fleksibilitas dalam menghadapi fluktuasi pendapatan hal tersebut didasarkan pada *working capital management theory* dimana pengelolaan modal kerja yang efektif dan efisien dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan pendapatan UMKM (Saputri, 2020). Sementara itu, penggunaan utang atau *financial leverage* dapat mempengaruhi struktur modal dan risiko keuangan, dengan tingkat yang tinggi dapat memberikan tekanan pada pendapatan bersih hal tersebut didasarkan pada konsep penggunaan utang yang dapat memberikan tekanan tinggi pada pendapatan bersih (Sunaryo, 2018). Namun, penting untuk diingat bahwa pendapatan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti strategi pemasaran dan kondisi pasar. Oleh karena itu, integrasi strategi keuangan yang holistik, termasuk keputusan mengenai anggaran kas, modal kerja, dan *financial leverage*, menjadi kunci dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan keberlanjutan keuangan perusahaan.

Variabel-variabel anggaran kas, modal kerja dan *financial leverage* digunakan untuk mengukur dampak dan pengaruh anggaran kas, modal kerja, dan *financial leverage* terhadap pendapatan usaha UMKM di Kecamatan Buleleng. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi pendapatan usaha UMKM, khususnya dalam konteks fluktuasi kesulitan permodalan yang terjadi. Pendapatan usaha yang mengukur sejauh mana pendapatan yang dihasilkan oleh UMKM di Kecamatan Buleleng. Pendapatan usaha ini adalah hasil dari aktivitas operasional bisnis. Anggaran kas, mengukur besarnya anggaran kas atau aliran kas yang tersedia atau dipersiapkan oleh UMKM di Kecamatan Buleleng. Ini mencakup pengeluaran dan penerimaan kas yang terkait dengan operasional bisnis. Modal kerja, mencerminkan tingkat modal yang digunakan oleh UMKM dalam operasional bisnisnya. Hal ini dapat mencakup investasi dalam persediaan, piutang, dan kas yang digunakan untuk menjalankan bisnis sehari-hari. *Financial leverage*, mencerminkan tingkat penggunaan utang dalam modal yang digunakan oleh UMKM. Tingkat *financial leverage* mencerminkan sejauh mana UMKM bergantung pada pinjaman untuk mendanai aktivitas bisnisnya.

Tingkat efektivitas penggunaan modal kerja menjadi sangat penting untuk pertumbuhan dan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang (Hapsari, 2015). Apabila perusahaan kekurangan modal kerja untuk memperluas penjualan dan meningkatkan produksinya, maka besar kemungkinan akan kehilangan pendapatan dan keuntungan. Setiap perusahaan memiliki dua tujuan utama yaitu yang pertama perusahaan mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kedua perusahaan mempunyai tujuan untuk menjaga likuiditasnya. Perusahaan harus dapat memenuhi kedua tujuan tersebut secara seimbang. Oleh karena itu, modal kerja harus dikelola seefektif mungkin agar laba perusahaan dapat ditingkatkan (Hapsari, 2015).

Pengelolaan modal kerja menuntut setiap perusahaan untuk mengelola usaha mereka dengan baik guna mencapai tujuan perusahaan. Salah satu tujuan perusahaan adalah mencapai laba yang maksimal. Untuk mencapai laba yang

maksimal, manajemen diuntut untuk melakukan perencanaan dan pengendalian dengan baik dan efektif terhadap sumber daya dan operasinya. Dengan melakukan perencanaan dan pengendalian yang baik maka sumber daya yang terbatas dari perusahaan akan dapat di manfaatkan secara efektif dan efisien untuk mengoptimalkan tujuan (Ritonga, 2014).

Dalam memulai sebuah usaha, salah satu hal paling penting yang dibutuhkan adalah modal. Modal merupakan faktor pendukung yang penting bagi pedagang untuk keberlangsungan usahanya. Berbagai kajian tentang sektor informal atau pengembangan usaha mikro, selalu mengedepankan peranan modal sebagai kesulitan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha ini. Hal ini memungkinkan akan turut mempengaruhi tingkat pendapatan pedagang. Hasil riset yang dilakukan oleh Tampubolon (2017), Artaman (2018) dan Kusumawardani (2019) menyatakan bahwa modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan, ini berarti bahwa semakin besar pengeluaran modal kerja dalam berdagang maka semakin besar pula pendapatan yang diperoleh pedagang. Namun hasil berbeda diperoleh dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rahmi 2017) dimana modal kerja berpengaruh namun tidak signifikan terhadap pendapatan UMKM. Kekurangan modal kerja bagi sebagian pedagang akan sangat membatasi kemampuan mengadakan persediaan barang yang cukup.

Berbagai cara telah di tempuh agar perusahaan dapat mencapai tujuannya. Salah satu alat yang penting untuk perencanaan dan pengendalian yang efektif adalah anggaran, dimana anggaran akan memudahkan manajemen dalam mengelola perusahaan ke arah pencapaian tujuan, terutama untuk mencapai laba yang tinggi dengan mengkoordinasi usaha dan menghindari pemborosan. Prinsip ini harus diadopsi oleh semua perusahaan, apapun bidang kegiatannya baik bergerak dibidang manufaktur, jasa, dagang, maupun perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan fisik. Salah satu rencana kegiatan yang di buat oleh manajemen dalam upaya menentukan kas minimal ini adalah dengan menyusun anggaran kas. Anggaran kas adalah estimasi terhadap posisi kas untuk periode tertentu di masa yang akan datang.

Dalam menyusun anggaran kas dapat diketahui kapan perusahaan dalam keadaan defisit kas dan surplus kas.

Anggaran kas dapat membantu manajemen di dalam mengatasi perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi posisi kas yang mungkin membahayakan kredit kas yang beredar. Oleh karena itu, penyusunan anggaran kas bagi perusahaan cukup penting guna menjaga tingkat proyeksi likuiditas perusahaan (Rasinih, 2016). Anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana pemerintah yang legislatif untuk dibelanjakan. Akan tetapi jika penyusunan anggaran kas tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya, akan diperlukan pengendalian tindakan korektif terhadap penyimpangan tersebut, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat segera diatasi dan apa yang menjadi tujuan instansi perusahaan akan tetap dapat tercapai. Dengan anggaran kas pula maka akan dapat diketahui apabila terdapat perbedaan di dalam waktu dan volume dari aliran kas masuk (*cash inflow*) dan aliran kas keluar (*cash outflow*) yang dapat menimbulkan kesulitan, karena hal ini berpengaruh terhadap besarnya uang kas yang tertahan di dalam perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Agus, 2019) menunjukkan bahwa pencatatan anggaran kas pelaku UMKM masih dilakukan secara sederhana, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan atau pemahaman mengenai akuntansi dan tidak adanya pemisahan antara keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan.

Anggaran kas merupakan bagian dari manajemen keuangan yang memerlukan pengelolaan yang baik agar tercapainya tujuan yang diharapkan. Dalam menjalankan operasinya kas merupakan aktiva lancar yang paling likuid bagi perusahaan khususnya perbankan atau salah satu modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Dana kegiatan operasi perusahaan yang telah dikeluarkan diharapkan dapat kembali dan tentunya dapat memberikan keuntungan serta perusahaan mampu membayar kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo (Poetri, 2022). Pengaruh anggaran kas terhadap pendapatan perusahaan juga dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Poetri (2022) yang memperoleh hasil bahwa anggaran kas berpengaruh secara positif terhadap pendapatan. Hasil yang sama juga diperoleh oleh Nurfadilah (2018)

faktor anggaran kas sebagai alat perencanaan dan anggaran kas sebagai alat pengendalian secara bersama-sama memberikan pengaruh secara signifikan terhadap pendapatan. Namun hasil berbeda diperoleh oleh Rizky (2019) dimana anggaran kas tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan.

Faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi pendapatan salah satunya adalah *financial leverage*. Faktor-faktor tersebut memang telah diteliti dalam banyak penelitian sebelumnya, tetapi hasil penelitian menunjukkan masih adanya gap atau perbedaan dalam hasil penelitian. Pada penelitian terdahulu, *financial leverage* merupakan alat yang digunakan dalam pengukuran efektivitas penggunaan utang perusahaan (Maronrong, 2017). *Financial leverage* (leverage keuangan) adalah konsep yang mengacu pada penggunaan utang atau pinjaman untuk memperbesar modal yang digunakan dalam operasi bisnis. Dalam konteks UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), penggunaan *financial leverage* bisa memiliki dampak terhadap pendapatan dan kinerja bisnis secara keseluruhan (Ramadhani, 2022). Dengan menggunakan utang atau modal pinjaman, UMKM dapat menginvestasikan lebih banyak sumber daya dalam bisnis mereka. Ini dapat mencakup perluasan produksi, pemasaran lebih agresif, atau investasi dalam teknologi yang lebih canggih. Jika investasi ini menghasilkan peningkatan pendapatan yang signifikan, maka *financial leverage* dapat membantu UMKM meningkatkan pendapatan mereka (Maronrong, 2017). Keputusan untuk menggunakan *financial leverage* harus diambil dengan hati-hati. UMKM perlu mempertimbangkan risiko yang terkait dengan utang dan potensi penghargaan dalam bentuk pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas. Keputusan ini harus sejalan dengan strategi bisnis dan profil risiko masing-masing UMKM.

Dalam penelitian Lestari & dan Nuzula (2017) diperoleh hasil bahwa *financial leverage* tidak berpengaruh terhadap pendapatan. Hasil berbeda diperoleh dalam penelitian yang dilakukan oleh Nopitasari et.,al (2017) dimana *financial leverage* memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan. Sehingga terdapat inkonsistensi hasil penelitian.

Survey awal pada 30 pelaku UMKM terkait dengan pengelolaan keuangan dan pendapatan di peroleh jumlah 20 UMKM yang belum

menerapkan pencatatan laporan keuangan dibandingkan dengan yang telah melakukan pencatatan keuangan. Meski demikian, dari 30 pelaku UMKM terdapat 10 pelaku UMKM yang ingin melakukan pencatatan laporan keuangan. Beranjak dari permasalahan di atas dan untuk mengetahui secara jelas bagaimana pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap pendapatan UMKM di Kecamatan Buleleng. Meskipun usaha kecil dan menengah memiliki kedudukan yang sangat potensial dalam perekonomian nasional, kenyataannya masih banyak masalah yang dihadapi dalam pengembangannya. Pengelolaan keuangan yang tidak baik pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat berdampak negatif pada pendapatan UMKM tersebut. Jika UMKM tidak memiliki pengelolaan keuangan yang baik, mungkin akan mengalami masalah likuiditas, di mana tidak ada cukup uang tunai untuk memenuhi kewajiban operasional sehari-hari. Tanpa pengelolaan keuangan yang baik, UMKM dapat mengalami pengeluaran yang tidak terkendali, misalnya, pembelian bahan baku yang tidak efisien atau pengeluaran operasional yang tidak perlu. Pengelolaan keuangan yang buruk dapat menyebabkan ketidakstabilan finansial, membuat UMKM lebih rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan perubahan pasar. Ketidakmampuan mengelola anggaran kas dengan baik dapat menyebabkan likuiditas rendah, di mana UMKM tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari. Hal ini dapat berdampak pada kelancaran operasional dan kemampuan untuk membayar kewajiban tepat waktu. Pengelolaan modal kerja yang kurang efektif dapat menyebabkan keterbatasan dalam membiayai siklus operasional. Jika UMKM tidak dapat mengelola persediaan, piutang, dan kewajiban dengan baik, dapat terjadi ketidakseimbangan dalam modal kerja, yang berdampak pada efisiensi dan stabilitas pendapatan. Masalah pengelolaan utang dan financial leverage dapat muncul jika UMKM tidak memahami risiko yang terkait dengan penggunaan utang. Jika tingkat hutang tinggi atau struktur modal yang buruk dipilih, beban bunga yang besar dapat mengurangi pendapatan bersih dan menyulitkan UMKM dalam memenuhi kewajiban keuangan.

Kebaruan dalam penelitian ialah terletak pada pemilihan variabel yang diturunkan dari fenomena yang terjadi di lapangan dan subjek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengenai Pengaruh Anggaran Kas, Modal Kerja Dan Financial Leverage Terhadap Pendapatan Usaha (Studi Kasus pada UMKM di Kecamatan Buleleng). Penggunaan variabel anggaran kas digunakan dalam penelitian terkait dengan pendapatan usaha. Acuan penggunaan variabel ini adalah penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurfadilah (2018) dengan judul penelitian Pengaruh Anggaran Kas Sebagai Alat Perencanaan dan Alat Pengendalian Terhadap Tingkat Pendapatan (Studi Kasus Pada Koperasi Bina Raharja Kuningan KCP Luragung) dan Rizky (2019) dimana keduanya menyertakan variabel anggaran kas untuk meneliti pengaruhnya terhadap pendapatan usaha. Namun memperoleh hasil yang berbeda atau inkonsistensi penelitian.

Teori *Resource-Based View* (RBV) memberikan perspektif yang bermanfaat dalam menjelaskan pengaruh anggaran kas, modal kerja, dan financial leverage terhadap pendapatan usaha UMKM. Dalam RBV, anggaran kas dapat dianggap sebagai salah satu aset strategis yang mempengaruhi daya saing UMKM. Pengelolaan anggaran kas yang efektif dapat meningkatkan fleksibilitas keuangan, memungkinkan UMKM untuk mengatasi tantangan pasar dan mendukung pertumbuhan pendapatan. Modal kerja, yang mencakup persediaan, piutang, dan kewajiban, dianggap sebagai sumber daya yang penting dalam RBV. Menurut perspektif RBV, sumber daya yang langka, berharga, tidak dapat ditiru, dan tidak dapat digantikan (VRIN) memiliki potensi untuk menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Dalam hal ini, permodalan bisa dilihat sebagai salah satu dari sumber daya tersebut. Pengelolaan modal kerja yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional, memastikan ketersediaan produk atau jasa, dan dengan demikian, berpotensi meningkatkan pendapatan UMKM. RBV juga mengakui peran *financial leverage* sebagai faktor yang memengaruhi kinerja perusahaan. Pemilihan struktur modal yang bijak dan manajemen utang yang tepat dapat memberikan keunggulan kompetitif melalui pengelolaan biaya modal dan peningkatan daya saing.

Berpedoman terhadap pernyataan tersebut, peneliti tertarik untuk memahami lebih mendalam mengenai pengaruh anggran kas, modal kerja, dan *financial leverage* terhadap pendapatan usaha di UMKM Kecamatan Buleleng. Oleh sebab itu, peneliti menjadikan pendapatan usaha UMKM di Kecamatan Buleleng sebagai variabel terikat dalam penelitian ini. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, peneliti mengangkat judul “**Pengaruh Anggaran Kas, Modal Kerja, dan *Financial Leverage* Terhadap Pendapatan Usaha (Studi Kasus pada UMKM di Kecamatan Buleleng)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang sebagai berikut:

1. Masih terdapat pencatatan manual untuk melakukan pengelolaan keuangan dengan mencatat pemasukan serta pengeluaran dari hasil usaha untuk mengetahui hasil jual mereka dalam satu harinya, terkadang pula tidak selalu melaksanakannya dikarenakan sibuk untuk melayani pembeli yang mengakibatkan lupa memasukkan ke dalam pembukuan sehingga kebingungan untuk menyisihkan uang pribadi dan uang usaha.
2. Masih kurangnya permodalan UMKM, karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas.
3. Sulitnya memperoleh modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya, dikarenakan persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.
4. Jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, ditambah lagi produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif, dikarenakan usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah penelitian digunakan untuk menghindari penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah, sehingga tujuan penelitian tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis memfokuskan penelitian ini pada UMKM di Kecamatan Buleleng sebagai subjek penelitian.
2. Penulis memfokuskan penelitian ini pada anggaran kas, modal kerja, *financial leverage* dan pendapatan usaha UMKM sebagai objek penelitian.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka dirumuskan beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana pengaruh anggaran kas terhadap pendapatan usaha UMKM di Kecamatan Buleleng?
2. Apakah modal kerja mempengaruhi pendapatan usaha UMKM di Kecamatan Buleleng?
3. Apakah *financial leverage* mempengaruhi pendapatan usaha UMKM di Kecamatan Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran, maka penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan penelitian yang dimaksud adalah:

1. Untuk menganalisa pengaruh anggaran kas terhadap pendapatan usaha UMKM di Kecamatan Buleleng.
2. Untuk mengetahui pengaruh modal kerja terhadap pendapatan usaha UMKM di Kecamatan Buleleng.
3. Untuk mengetahui pengaruh *financial leverage* terhadap pendapatan usaha UMKM di Kecamatan Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Melalui terlaksananya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan manfaat, baik manfaat akademik maupun manfaat praktis. Manfaat tersebut adalah:

1. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual bagi perkembangan kajian ilmu akuntansi keuangan, khususnya mengenai anggaran kas, modal kerja, dan *financial leverage* terhadap pendapatan usaha UMKM.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pemerintah daerah, terutama dalam hal perencanaan ekonomi dan pengambilan kebijakan terkait UMKM. Hasil penelitian dapat membantu pemerintah memahami faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan usaha UMKM, sehingga mereka dapat merancang kebijakan yang lebih efektif.

b. Bagi Pelaku UMKM

UMKM dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan bisnis mereka. Mereka dapat memahami bagaimana mengatur anggaran kas, modal kerja, dan leverage keuangan untuk mengoptimalkan pendapatan usaha mereka. Penelitian ini juga membantu UMKM dalam perencanaan keuangan yang lebih baik. Mereka dapat mengambil langkah-langkah yang lebih terinformasi untuk meningkatkan pendapatan usaha mereka.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini berkontribusi pada pengetahuan akademik dan ilmu ekonomi. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pembelajaran di lingkungan universitas, memperkaya kurikulum, dan

meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang hubungan antara manajemen keuangan dan pendapatan usaha.

